

## IMPLEMENTASI PROGRAM SIAGA KEPENDUDUKAN PADA SMAN 1 NGAGLIK SLEMAN

Oleh : Yulia Kartikasari dan Nur Hidayah  
Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
Email : yuliakartika1999@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Ngaglik Sleman dan mengetahui faktor pendorong serta faktor penghambat dari implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dengan triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis model Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program sekolah siaga kependudukan diterapkan melalui integrasi pendidikan kependudukan kedalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Pada proses pembelajaran, pendidikan kependudukan diintegrasikan kedalam mata pelajaran dengan kompetensi dasar yang telah diseleksi dan relevan dengan materi yang diajarkan. Pada kegiatan sekolah, pendidikan kependudukan diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan PIK-R. Proses implementasi program ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yaitu: 1) dukungan dari guru; dan 2) fasilitas yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: 1) kesulitan mengintegrasikan pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar; 2) adanya pandemi Covid-19; 3) kesulitan dalam mengadakan sarana prasarana; dan 4) biaya mahal.

**Kata Kunci: Implementasi, Program, SSK.**

### Abstract

*This study aimed to determine the implementation of the population alert school program in SMA N 1 Ngaglik Sleman and to determine the driving factors and inhibiting factors of the implementation of the program. This study uses a descriptive qualitative method. There are 10 informants in this study who were selected using purposive sampling technique. Data collected by observation, interview, and documentation. The validity of the data used by source triangulation and data analysis techniques using the Miles and Hubberman model analysis technique. The results of this study indicate that the population alert school program is implemented through the integration of population education into the learning process and school activities. In the learning process, population education is integrated into subjects with selected basic competencies that are relevant to the material being taught. In school activities, population education is taught through scout extracurricular activities and PIK-R. The process of implementing this program is also influenced by several driving factors are: 1) support from teachers, and 2) supporting facilities. While the inhibiting factors are: 1) difficulty integrating population education into basic competencies, 2) the presence of the Covid-19 pandemic, 3) difficulties in providing infrastructure, and 4) expensive cost*

**Keywords: Implementation, Program, SSK.**

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk tergolong banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) pada Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,18 juta jiwa. Selain itu, Indonesia juga diprediksi mengalami masa bonus demografi. Bonus demografi yang dimanfaatkan sebaik-baiknya dapat membawa dampak positif pada berbagai aspek bidang. Namun, bonus demografi yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka dapat memicu timbulnya permasalahan kependudukan berupa ledakan penduduk.

Menurut BKKBN pada Jurnal Keluarga (2018) menjelaskan penyebab ledakan penduduk dipengaruhi oleh kematian, kelahiran dan pernikahan usia dini. Indraswari dan Risni (2017) berpendapat bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) di Indonesia menunjukkan angka 2,6 di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa angka TFR tersebut tergolong tinggi. Selain itu, Alfana dan Beti (2017) menjelaskan rata-rata prevalensi pernikahan usia dini sebanyak 13,3 persen. Menurut data BPS dalam Alfana dan Beti (2017) juga menjelaskan pada tahun 2015 di Provinsi DIY jumlah anak yang melakukan pernikahan usia dini mencapai 13 ribu. Data yang diperoleh

KUA Kecamatan Ngaglik dalam Tyas dan Siti (2018) memaparkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 137 pasangan yang belum ideal untuk menikah. Selain itu, berdasarkan data KUA Kabupaten Sleman 2013-2015 yang diperoleh Alfana dan Beti (2017) memaparkan bahwa Kecamatan Ngaglik menjadi salah satu penyumbang pernikahan usia dini terbanyak setelah Kecamatan Mlati. Pada data tersebut menunjukkan Kecamatan Ngaglik menyumbang angka pernikahan dini berjumlah 46.

Tingginya angka kelahiran dan kasus pernikahan usia dini turut menyumbang laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pendidikan kependudukan yang diajarkan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMAN 1 Ngaglik Sleman. Program SSK di SMAN 1 Ngaglik menjadi program yang penting dalam proses mengedukasi generasi muda untuk menjadi generasi berencana dan tidak melakukan pernikahan usia dini. Selain itu, program SSK ini juga sebagai upaya untuk menekan kenakalan remaja seperti seks bebas, NAPZA, klitih dan masalah sosial lainnya. Hapsari (2019) menjelaskan untuk menekan kenakalan remaja, BKKBN DIY membentuk sekolah siaga

kependudukan. Namun, implementasi program SSK di SMAN 1 Ngaglik belum terlihat jelas. Di sisi lain, alasan terpilihnya SMAN 1 Ngaglik sebagai SSK juga belum diketahui secara pasti. Program SSK merupakan program yang tergolong baru, sehingga masih sedikit orang yang mendengar dan paham akan program tersebut. Penelitian yang mengkaji tentang SSK juga belum terlalu banyak khususnya mengenai implementasi program tersebut. Sehingga sangat penting dilakukan suatu penelitian yang mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi program tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program SSK yang diterapkan di SMAN 1 Ngaglik Sleman beserta faktor pendorong dan penghambatnya.

### 1. Pendidikan Kependudukan

Pendidikan kependudukan menjadi salah satu edukasi yang penting bagi masyarakat khususnya generasi muda. Abu Ahmadi (2016) mendefinisikan pendidikan kependudukan merupakan suatu usaha dari bagian pendidikan dengan maksud memberikan pengertian tentang kependudukan yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hidup kelak. Pendidikan kependudukan yang digagas oleh BKKBN memiliki tujuan untuk menyiapkan generasi muda yang

paham akan kependudukan, masalah dan isu-isu kependudukan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kependudukan ialah proses penanaman pengetahuan dan upaya membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan kependudukan yang berguna di masa mendatang. Pendidikan kependudukan sendiri dibedakan menjadi tiga jalur pendidikan. BKKBN dalam info grafis pendidikan kependudukan (2017) menyatakan terdapat tiga jalur pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Jalur formal. Ruang lingkup pendidikan kependudukan pada jalur formal yaitu SD-MI, SMP-Mts, SMA-MA, dan perguruan tinggi. Melalui sekolah, pendidikan kependudukan diterapkan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), program pendidikan di sekolah seperti gemar membaca, pelatihan guru, bimbingan konseling, pojok kependudukan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perguruan tinggi dapat diterapkan melalui kegiatan kemahasiswaan, kegiatan perkuliahan, kegiatan penelitian dan pojok kependudukan.
- b. Jalur non formal. Pada jalur non formal, pendidikan kependudukan diterapkan pada materi pelajaran diklat. Ruang lingkup pendidikan kependudukan pada jalur non formal

di Balai Diklat Pemerintah dan Swasta.

- c. Jalur informal. Pada jalur informal, pendidikan kependudukan diterapkan dalam kegiatan keluarga atau kegiatan kelompok masyarakat. Ruang lingkup pendidikan kependudukan pada jalur informal dapat diterapkan pada pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok (poktan) masyarakat, dan media massa.

## 2. Sekolah Siaga Kependudukan

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN (2017) mendefinisikan sekolah siaga kependudukan merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kedalam mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ialah program sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan untuk disampaikan kepada peserta didik mengenai beberapa materi yang relevan dengan materi kependudukan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

merupakan bagian dari program pendidikan kependudukan di jalur formal yaitu melalui sekolah.

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN (2017) menjelaskan bahwa SSK bukanlah sesuatu mata pelajaran yang baru sehingga tidak perlu menambah jam atau mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya program SSK yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan kedalam beberapa mata pelajaran dapat memperdalam materi-materi yang akan dibahas. Dalam pelaksanaannya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang di dalamnya memuat pendidikan kependudukan menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi kependudukan dengan dukungan materi dan media yang berhubungan dengan kependudukan contohnya seperti buku dan pojok kependudukan. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan BKKBN (2017) mendefinisikan pojok kependudukan sebagai sumber belajar untuk peserta didik yang berisi materi kependudukan sebagai upaya pembentukan generasi

berencana. Dengan demikian, pendidikan kependudukan yang dibantu dengan fasilitas berupa pojok kependudukan diharapkan dapat mempermudah pemahaman peserta didik dalam memahami materi kependudukan.

### **3. Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parsons**

Talcott Parsons memiliki pandangan dalam bidang pendidikan. Menurut Parsons, pendidikan merupakan sarana untuk melestarikan pola-pola kehidupan sosial dan budaya. Pendidikan juga sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan seleksi. Melalui pendidikan, individu memperoleh kecakapan teknis, sosial dan rasa tanggungjawab. Dalam pandangannya, Talcott Parsons juga mengemukakan fungsi pendidikan. Menurut Hanum (2011) Talcott Parsons mengemukakan fungsi pendidikan sebagai berikut:

a. Sekolah sebagai sarana sosialisasi utama  
Parson menunjukkan adanya fungsi fundamental dari pendidikan primer dan sekunder sebagai lembaga menengah antara sosialisasi keluarga dan seleksi peran dewasa. Parson menjelaskan terdapat dua fungsi

dari sekolah yaitu mengarahkan peserta didik dari orientasi askriptif ke orientasi prestasi dan alokasi seleksi ke peran-peran dewasa yang diberi penghargaan yang berbeda. Parson dalam hal ini menekankan pada tingkatan sekolah primer karena seluruh proses dimulai dari sana.

#### **b. Partikularisme-Universalisme dan Askripsi-Prestasi**

Parson menjelaskan bahwa sekolah memiliki fungsi spesial yaitu mensosialisasikan individu dari orientasi partikularisme ke orientasi universalisme dan orientasi askripsi ke orientasi prestasi. Pada fungsi ini sekolah sebagai sarana mensosialisasikan anak dari orientasi partikularisme dan askripsi yang biasa ia terima di rumah ke orientasi universal dan prestasi yang umumnya lebih dibutuhkan oleh mereka kelak di kemudian hari.

#### **c. Seleksi dan alokasi**

Pada fungsi ini, Parson menjelaskan bahwa pendidikan menjadi penting karena memiliki tugas untuk mempersiapkan peserta didik di dunia kerja. Sekolah memiliki fungsi primer dimana mengantarkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dan motivasi tinggi untuk

dapat terpilih pada peran dewasa dan lebih sulit. Sehingga melalui proses sekolah dan melihat prestasi dan motivasinya dapat benar-benar fungsional sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Kesamaan kesempatan

Hanum (2011) menjelaskan bahwa Parson memahami tidak semua peserta didik yang diberikan kesempatan sama akan sama berhasilnya. Parson sebenarnya sadar bahwa proses seleksi sudah berlangsung dalam sosialisasi di sekolah. Namun, menurut Parson fungsi sekolah bukanlah untuk itu. Sekolah memiliki fungsi untuk meyakinkan bahwa semua peserta didik diperlakukan sama dan diberi kesempatan yang sama dalam mencapai kesuksesannya dan dalam bidang yang mereka inginkan. Dengan

diberlakukannya fungsi tersebut tentu peserta didik dapat berhasil. Hal ini diperkuat oleh Hanum (2011) menjelaskan jika peserta didik memiliki kemampuan dan motivasi yang sama tentu dapat sama-sama berhasil.

#### 4. Teori Fisiologi dan Sosial Ekonomi

##### John Stuart Mill

John Stuart Mill (dalam Mantra, 2015) mengatakan manusia dapat

mempengaruhi perilaku demografinya dan seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tinggi rendahnya kelahiran dapat ditentukan oleh manusia itu sendiri. Melihat tinggi rendahnya kelahiran dapat ditentukan oleh manusia, maka Mill menyarankan sebuah solusi dimana pendidikan penduduk perlu ditingkatkan.

Mantra (2015) mengatakan meningkatnya pendidikan penduduk membuat mereka akan mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai karir dan usaha yang ada. Peningkatan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh golongan mampu, tetapi juga perlu disamaratakan dengan penduduk golongan tidak mampu. Selain itu, Mill dalam teorinya juga mengemukakan bahwa perempuan sebenarnya tidak menghendaki jumlah anak yang banyak. Jika keinginan perempuan tersebut lebih diperhatikan lagi, maka tingkat kelahiran akan rendah.

##### Metode

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Ngaglik yang beralamat di

Jalan Palagan Tentara Pelajar No. Km 13,5, Kayunan, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di SMAN 1 Ngaglik karena sekolah ini merupakan sekolah yang mencanangkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) satu-satunya di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 18 November 2020 sampai 2 Januari 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Auerbach dan Silverstein (dalam Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif ialah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks serta hasil interview untuk menemukan makna dalam fenomena. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini disajikan dalam bentuk deskriptif dimana cara pendeskripsiannya menggunakan kata-kata dan bukan terfokus pada angka.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti dapat memperoleh data dan menyajikannya secara deskriptif mengenai “Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan di SMAN 1 Ngaglik Sleman”. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan dari penelitian yang menjabarkan mengenai

implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Ngaglik Sleman dan faktor pendorong serta faktor penghambat implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Ngaglik Sleman. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti telah mempertimbangkan untuk memilih sampel sebagai sumber data penelitian diantaranya 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 4 orang tim Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), dan 4 orang guru mata pelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sosiologi, Geografi dan PJOK.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mempertimbangkan untuk memilih sampel sebagai sumber data penelitian diantaranya 1 orang kepala sekolah, 1 orang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 4 orang tim Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), dan 4 orang guru mata pelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sosiologi, Geografi dan PJOK. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu informan dari guru di SMA Negeri 1 Ngaglik yang telah peneliti tentukan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen perjanjian kerja sama antara perwakilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY) dengan SMA N 1 Ngaglik, materi pelatihan mengenai integrasi pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran, surat tugas tim SSK SMA N 1 Ngaglik, RPP, dan dokumentasi foto kegiatan program SSK di SMA N 1 Ngaglik serta informasi profil sekolah yang diperoleh dari laman sekolah <https://sman1ngaglik.sch.id/>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Miles dan Hubberman yang terdiri atas empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Program SSK dalam Proses Pembelajaran**

Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMAN 1 Ngaglik merupakan program pemerintah yang diterapkan pada

jalur formal. Program SSK ialah program yang dicanangkan oleh BKKBN yang di dalamnya memuat pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kedalam mata pelajaran.

Sebelum program ini diimplementasikan pada proses pembelajaran, para guru diberikan pelatihan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus yang terintegrasi dengan program SSK terlebih dahulu. Sehingga guru diwajibkan menyusun RPP yang memuat materi-materi kependudukan di dalamnya. Selain itu, kurikulum yang digunakan tetap menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi. Hal ini dikarenakan belum ada kurikulum khusus yang berkaitan dengan program SSK. Selain itu, program SSK yang memuat pendidikan kependudukan hanya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran dan tidak menambah jam pelajaran.

Namun, dalam proses pengintegrasian materi kependudukan dalam mata pelajaran, guru perlu memilih kompetensi dasar yang cocok dan relevan untuk diintegrasikan dengan materi-materi kependudukan. Hal ini



dikarenakan tidak semua kompetensi dasar dapat diintegrasikan dengan materi kependudukan. Selain itu, materi-materi kependudukan yang akan diintegrasikan harus menyesuaikan dengan materi dan bidang mata pelajaran. Adapun materi-materi yang disisipkan dalam mata pelajaran yaitu mengenai Penyakit Menular Seksual (PMS), kesehatan reproduksi, kesehatan remaja, pencegahan pernikahan usia dini, pengaruh penduduk terhadap ekonomi, menghitung jumlah pertumbuhan penduduk, demografi kependudukan, perencanaan keluarga, masalah kependudukan, isu kependudukan, pencegahan perceraian, natalitas, fertilitas, perubahan dinamika kependudukan, statistik kependudukan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan lain-lain.

Dalam penerapan program sekolah siaga kependudukan pada proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi dan ceramah. Namun, adanya pandemi Covid-19 menyebabkan guru kesulitan menyampaikan pendidikan kependudukan kepada peserta didik secara tatap muka melainkan secara daring. Akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi oleh masing-masing guru. Selain itu, guru juga

menggunakan media pembelajaran berupa poster, pamflet, video dari *Youtube*, teks bacaan, dan *Power Point Text* (PPT). Sedangkan untuk sumber bahan ajar menggunakan sumber digital dan cetak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru di SMA Negeri 1 Ngaglik telah menerapkan program SSK melalui pendidikan kependudukan yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Melalui mata pelajaran, topik-topik mengenai kependudukan dapat dipertajam dengan melihat realita kependudukan saat ini. Walaupun dalam proses penerapan program SSK kedalam proses pembelajaran mengalami kendala karena adanya pandemi Covid-19, namun para guru memiliki solusi untuk memberikan pemahaman pendidikan kependudukan secara daring.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat dianalisis menggunakan pandangan pendidikan dalam perspektif struktural milik Talcott Parsons. Program sekolah siaga kependudukan yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Ngaglik menunjukkan bahwa sekolah sebagai sarana sosialisasi utama dalam menyampaikan nilai-nilai yang berkaitan dengan kependudukan.

Sosialisasi nilai-nilai ini ditunjukkan melalui pendidikan kependudukan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran. Dengan dibekalinya pendidikan kependudukan melalui proses pembelajaran maka peserta didik dapat memperoleh materi kependudukan yang dibutuhkan kelak dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, melalui pendidikan kependudukan dapat mengubah cara pandang peserta didik untuk tidak melakukan pernikahan usia dini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program sekolah siaga kependudukan yang diimplementasikan di SMA Negeri 1 Ngaglik tidak hanya sekedar berfungsi mensosialisasikan nilai-nilai tetapi juga mengubah cara pandang peserta didik dengan wawasan baru.

Selain itu, program sekolah siaga kependudukan yang di dalamnya memuat pendidikan kependudukan memberikan pengetahuan terkait kependudukan seperti perencanaan keluarga, kelahiran, kematian, pencegahan pernikahan usia dini, dan materi lainnya yang tidak sering mereka dapatkan di rumah. Hal ini berkaitan dengan fungsi partikularisme-universalisme dan askripsi-prestasi. Parson (dalam Hanum, 2011)

menjelaskan bahwa fungsi pendidikan adalah mensosialisasikan anak dari arah partikularisme ke universalisme dan dari arah askripsi ke prestasi. Pada fungsi ini sekolah memiliki fungsi sebagai sarana untuk mensosialisasikan anak dari orientasi partikularisme dan askripsi yang biasa mereka alami di rumah ke arah universalisme dan prestasi yang umumnya dibutuhkan oleh anak di kemudian hari. Maka melalui program SSK di SMA Negeri 1 Ngaglik yang di dalamnya memuat pendidikan kependudukan sebenarnya bertujuan untuk membekali anak agar mereka paham tentang kependudukan. Umumnya pendidikan kependudukan tidak sering diberikan di dalam rumah, sehingga sekolah memiliki peran lebih dalam mensosialisasikan pemahaman kependudukan tersebut

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dianalisis menggunakan teori fisiologi dan sosial ekonomi John Stuart Mill. Menurut Mill (dalam Mantra, 2015) menjelaskan bahwa manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya dan seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Mengingat tinggi rendahnya kelahiran dapat ditentukan oleh

manusia itu sendiri, maka Mill menawarkan sebuah solusi untuk meningkatkan pendidikan penduduk agar penduduk dapat mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program sekolah siaga kependudukan dapat mengubah cara pandang peserta didik untuk lebih mementingkan tingkat pendidikannya dibandingkan menikah di usia dini. Dengan mementingkan tingkat pendidikan dan dibekalinya pendidikan kependudukan dari sekolah maka peserta didik dapat mempertimbangkan ulang untuk menikah secara dini. Selain itu, peserta didik juga dapat mempertimbangkan secara matang untuk membentuk keluarga dan merencanakan jumlah anak sesuai kondisi keluarga.

## **2. Implementasi Program SSK dalam Kegiatan Sekolah**

Program sekolah siaga kependudukan tidak hanya diterapkan dalam proses pembelajaran saja tetapi juga dalam kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah yang berkontribusi besar dalam proses pengimplementasian program ini adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan Pusat Informasi dan

Konseling Remaja (PIK-R). Pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, pendidikan kependudukan disampaikan melalui kerja kelompok. Selama proses kerja kelompok, peserta didik diberikan pemahaman materi yang berkaitan dengan kependudukan seperti keluarga berencana, perencanaan keluarga sejahtera, bahaya NAPZA, pernikahan dini, pendataan penduduk, menggambar peta kependudukan dan materi lain yang relevan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pramuka tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sehingga sekolah berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan pramuka secara daring.

Pada kegiatan ekstrakurikuler PIK-R, program sekolah siaga kependudukan didukung secara antusias oleh peserta didik yang tergabung dengan ekstrakurikuler tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak PIK-R untuk mendukung jalannya program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik Sleman adalah membuat poster kependudukan, membuat mading kependudukan dan membahas materi kependudukan yang dilakukan dengan antusias.

Program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik juga didukung dengan adanya fasilitas pojok kependudukan. Pojok kependudukan di SMAN 1 Ngaglik dilengkapi dengan fasilitas meja, kursi, rak buku, buku-buku yang berkaitan dengan kependudukan, mading kependudukan, poster kependudukan dan beberapa media lainnya. Selain itu, pojok kependudukan ini juga mendapat bantuan dana dari BKKBN untuk memaksimalkan fasilitas tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dianalisis dengan menggunakan pandangan pendidikan perspektif struktural fungsional mengenai fungsi pendidikan yaitu memberikan kesamaan kesempatan. Implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik menunjukkan adanya fungsi kesamaan kesempatan. Fungsi ini ditunjukkan pada saat pendidikan kependudukan diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler PIK-R. Pada kegiatan tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya terkait kependudukan. Di sisi lain, adanya fasilitas pojok kependudukan juga membuka kesempatan yang

sama bagi peserta didik untuk memperluas wawasannya di bidang kependudukan. Namun, proses implementasi program sekolah siaga kependudukan pada kegiatan sekolah mengalami hambatan karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga implementasi program sekolah siaga kependudukan pada kegiatan sekolah tidak dapat dilakukan secara maksimal seperti sebelumnya.

Selain disediakan beberapa fasilitas yang mendukung, SMAN 1 Ngaglik juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak terkait seperti puskesmas, pihak desa, instansi-instansi di sekitar sekolah dan pihak lain agar implementasi program sekolah siaga kependudukan dapat berjalan. Namun, peneliti menemukan bahwa SMA N 1 Ngaglik belum melakukan kerja sama secara mandiri dengan beberapa sekolah yang sama-sama mencanangkan program sekolah siaga kependudukan. Sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi pihak sekolah kedepannya.

### **3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pada Program SSK**

Setiap program yang dilakukan tentu di dalamnya terdapat faktor pendorong dan penghambat selama pelaksanaan program

tersebut. Sama halnya dengan program sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Ngaglik yang didalamnya memuat faktor pendorong dan faktor penghambat.

#### **a. Faktor Pendorong**

##### **1) Dukungan dari guru**

Adanya dukungan dari guru di SMAN 1 Ngaglik menjadi salah satu faktor pendorong implementasi program sekolah siaga kependudukan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa guru telah mengikuti pelatihan penyusunan silabus dan RPP yang terintegrasi pendidikan kependudukan, tentu hal ini menjadi semangat para guru untuk ikut serta dalam membantu proses implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Ngaglik. Di sisi lain, adanya prestasi dari kegiatan PIK-R yang membawa nama SMAN 1 Ngaglik hingga tingkat provinsi memotivasi para guru untuk lebih bersemangat dan mendukung pelaksanaan program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik.

##### **2) Fasilitas yang mendukung**

Program sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Ngaglik didukung dengan adanya fasilitas pojok kependudukan. Pojok kependudukan yang dilengkapi dengan buku bacaan, meja, kursi, alas karpet, rak buku, *banner*, mading kependudukan dan poster kependudukan. Selain itu, pojok kependudukan juga dilengkapi dengan beberapa peralatan yang mendukung seperti TV dan laptop. Buku-buku yang disediakan di pojok kependudukan sebagian besar didapatkan dari BKKBN. Dengan adanya fasilitas tersebut maka dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya mengenai kependudukan dan implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik dapat berjalan.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Kesulitan mengintegrasikan pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar**

Program sekolah siaga kependudukan mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran. Namun, pada

kenyataannya proses pengintegrasian tersebut harus memilih kompetensi dasar yang cocok dan tepat untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Hal ini dikarenakan tidak semua kompetensi dasar dapat dipaksakan untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Selain itu, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Sehingga belum ada kurikulum yang mengatur secara khusus untuk program sekolah siaga kependudukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, guru dapat memilih kompetensi dasar yang dirasa sesuai untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Contohnya seperti mata pelajaran matematika yang dapat diselipkan materi kependudukan yaitu menghitung jumlah penduduk.

## 2) Adanya pandemi Covid-19

Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik tidak dapat dilakukan secara maksimal. Seperti pada proses

pembelajaran yang awalnya dapat dilakukan secara tatap muka terpaksa dilakukan secara daring. Di sisi lain, proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring menyebabkan penyampaian pendidikan kependudukan tidak maksimal karena terbatasnya waktu dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru.

Pandemi Covid-19 juga menghambat kegiatan pendukung program sekolah siaga kependudukan. Terbatasnya pertemuan tatap muka menyebabkan peserta didik tidak dapat mengelola pojok kependudukan secara maksimal. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga terpaksa dilakukan secara daring. Dengan demikian, Pandemi Covid-19 membawa pengaruh yang cukup besar dalam proses pengimplementasian program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik.

### 3) Kesulitan dalam mengadakan sarana prasarana

Program sekolah siaga kependudukan menyediakan fasilitas berupa pojok kependudukan. Namun, dalam proses pengadaan fasilitas tersebut terdapat kendala yaitu kesulitan dalam mengadakan bahan bacaan yang berkaitan dengan kependudukan. Terbatasnya bahan bacaan tersebut menyebabkan pihak sekolah harus berusaha keras untuk melengkapi buku-buku di pojok kependudukan dengan cara membeli buku dan mengupayakan pengadaan sumber bacaan dari BKKBN.

### 4) Biaya mahal

Pengimplementasian program sekolah siaga kependudukan membutuhkan biaya yang tidak murah. Walaupun program ini telah mendapatkan bantuan dana dari BKKBN, namun anggaran untuk pengadaan fasilitas pojok kependudukan dan sarana prasarana pendukung lainnya tetap membutuhkan biaya yang mahal.

### Simpulan

Program sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Ngaglik telah berjalan. Program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik telah diterapkan ke dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Pada proses pembelajaran, pendidikan kependudukan diintegrasikan ke dalam hampir semua mata pelajaran melalui kompetensi dasar yang telah dipilih dan sesuai. Integrasi pendidikan kependudukan pun perlu disesuaikan dengan materi pelajaran dan kompetensi dasar yang ada sehingga dapat relevan.

Sedangkan pada kegiatan sekolah, pendidikan kependudukan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan kegiatan pramuka serta didukung dengan adanya fasilitas pojok kependudukan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 ini menyebabkan implementasi program sekolah siaga kependudukan tidak dapat berjalan secara maksimal. Seperti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring menyebabkan waktu pertemuan menjadi terbatas dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi kependudukan. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga terpaksa dilaksanakan secara daring. Pandemi

Covid-19 ini juga menyebabkan pojok kependudukan tidak dapat dimaksimalkan karena keterbatasan pertemuan tatap muka.

Implementasi program sekolah siaga kependudukan di SMAN 1 Ngaglik dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong yaitu: (1) dukungan dari guru, dan (2) fasilitas yang mendukung. Selain itu, ada pula penghambat dari jalannya implementasi program sekolah siaga kependudukan yaitu: (1) kesulitan mengintegrasikan pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar, (2) Adanya Pandemi Covid-19, (3) kesulitan dalam mengadakan sarana prasarana, dan (4) biaya mahal.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini, sehingga terlaksana dengan baik, serta kepada tim redaksi Jurnal Dimensia Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNY yang telah mempublikasikan karya ini.

### Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. 2016. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahmadi, R. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Alfana, M.A.F dan Beti, N.A, Pernikahan Dini dan Agenda Kebijakan Kedepan (Kasus di Kabupaten Sleman), *Jurnal Natapraja*, Volume 5, Nomor 2, 2017, 137-148.

Badan Pusat Statistik. 2015. *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS*. Diunduh <https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>. Pada tanggal 10 April 2020.

BKKBN. 2018. *Jurnal Keluarga Informasi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga*. Diunduh di [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal\\_Keluarga\\_Edisi\\_Keempat\\_2018.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Jurnal_Keluarga_Edisi_Keempat_2018.pdf). Pada tanggal 8 April 2020.

BKKBN. 2017. *Info Grafis Pendidikan Kependudukan*. Diunduh <https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Info.Grafis.Pendiduk.pdf>. Pada tanggal 3 Maret 2020.

Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dan Badan Keluarga Berencana Nasional. 2017. *Pedoman Pengelolaan Pendidikan Kependudukan Melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP, SMA, dan Sederajat*. Tersedia di <http://balaidiklatkbbogor.blogspot.com/2017/10/pelatihan-sekolah-siaga-kependudukan.html> **diunduh pada tanggal 7 April 2020.**

Hanum, F. 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Kanwa Publisher

Hapsari. A. 2019. *Sekolah Siaga*



*Kependudukan Tekan Kenakalan Remaja*. Diunduh <https://www.suaramerdeka.com/amp/news/baca/206531/sekolah-siaga-kependudukan-tekan-kenakalan-remaja>. Pada tanggal 10 April 2020.

Indraswari, R.R dan Risni, J.Y, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data SKDI 2012, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 12, Nomor 1, 2017, 1-12.

Mantra, I. B. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tyas, A.K.W.S., dan Siti, H.B.A, Pengambilan Keputusan Menikah Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Sukoharjo Ngaglik, *Jurnal Spirits*, Volume 8, No 2, 2018, 78-93.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet.